

Pengaruh ketidakmayoritarian partai politik kepala daerah dalam DPRD (Divided Government) terhadap keterlambatan penetapan APBD (Budget Delay) berdasarkan perspektif ekonomi politik

Sigit Wahyu Kartiko, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20277978&lokasi=lokal>

Abstrak

Mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering ditetapkan setelah awal tahun anggaran yang baru? Apakah karena faktor politis? Penelitian ini ingin mengetengahkan perspektif ekonomi politik divided government sebagai salah satu faktor penyebab buruknya kinerja penetapan APBD. Hasil Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2005, 2006 dan 2007 menunjukkan sangat sedikit membentuk pemerintahan yang mayoritas. Akibatnya, persaingan kepentingan antara eksekutif dan legislatif diduga mengemuka sehingga pembahasan APBD tahun anggaran 2008 dan 2009 terancam berlarut-larut.

Dengan menggunakan model persamaan regresi logit diperoleh hasil bahwa formasi pemerintahan berupa single minority party, minority coalition, majority coalition, dan single majority party mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD sepanjang tahun 2008-2009. Semakin kuat dukungan partai eksekutif di parlemen semakin cepat penetapan APBD-nya. Namun demikian seberapa lama delay penetapan APBD yang terjadi tidak dipengaruhi oleh 4 formasi pemerintahan tersebut yang ditunjukkan melalui estimasi model data panel. Hasil ini juga menjelaskan bahwa sebelum batas waktu keterlambatan ? 1 Januari tahun fiskal baru ? ketegangan eksekutif-legislatif dipengaruhi oleh 4 formasi pemerintahan daerah dan besarnya total belanja APBD. Setelah pemerintahan daerah tersebut gagal memenuhi ketepatan waktu penetapan APBD sebelum batas waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya penetapan APBD antara lain adalah besarnya total belanja APBD, dan kepemilikan sumber daya alam. Sedangkan besarnya nilai gaji dan tunjangan anggota DPRD ternyata mempercepat penetapan APBD. Secara umum, hal ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang memperlihatkan bahwa perilaku indisipliner aktor politik anggaran seperti memaksimalkan anggaran, konflik kepentingan, dan rent seeking atas common pool resources berupa anggaran daerah diindikasikan cukup relevan dengan berlarutnya pembahasan APBD.

<hr>

Abstract

Why is APBD (Regional Budget) often made after the beginning of the year for a new budget? Is it because of political factor? The research would like to highlight the economic and political perspectives of divided government as one of the factors of the bad performance of the Regional Budget (APBD). The results of the

General Election for the Legislatives 2004 and the Direct Local Elections of the years 2005, 2006, and 2007 show very few form the majority of the government. Consequently, the interest competition between the executives and the legislatives is assumed to appear so that the discussion of APBD of the years 2008 and 2009 is threatened to be delayed.

By using logit regression equation model, a result obtained shows that government formations, such as single minority party, minority coalition, majority coalition, and single majority party, influence the Regional Budget delay of the year 2008-2009. The stronger the support of the executive party in the parliament, the faster the making of the APBD is. However, the duration of the APBD delay occurring is not influenced by the 4 government formations shown through the panel data model estimation.

The result also explains that before the time limit of the delay ? January 1 of the new fiscal year - the executive-legislative tense is influenced by 4 regional government formations and the total amount of APBD expenditure. After the region fails to fulfill the punctuation of the making of APBD before the time limit, the factors influencing the duration of the making of APBD are, among others, the total amount of APBD expenditure and the possession of natural resources. On the other hand, the amount of the salary and benefits of the members of DPRD (Regional House of Representatives) turn out to accelerate the making of APBD. Generally, this result is suitable with the previous reseach results showing that indiscipline behaviour of the budget political actors, such as maximazing the budget, conflict of interest, and rent seeking on common pool resources in a form of regional budget, is indicated to be sufficiently relevant with the APBD discussion delay.